

Keberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Sub DAS Rindu Hati Kabupaten Bengkulu Tengah

Zairin, Yanmesli, Abditama Srifitriani

Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Bengkulu

E-mail: abditama.srifitriani@gmail.com

Diterima 30 Oktober 2019, Direvisi 16 Desember 2019, Disetujui Publikasi 30 Desember 2019

Abstract

The research objective is to explain the level of community empowerment in the management of water resources in the upstream part of the Air Bengkulu Watershed (Rindu Hati Sub-watershed), and the benefits of the research are: 1) For the Community, it can be used as a basis or reference for increasing empowerment and active involvement in all programs empowering the government or having full awareness to protect and control the environment in order to remain sustainable; 2) For the Government, Can be used as a material consideration in making policies, especially in the field of community empowerment, and 3) For researchers, As one of the contributions of knowledge and references for further research. The research method used is descriptive qualitative. The informants in this study were the community and village officials of Rindu Hati. Data analysis was performed using the snowball technique. The results of the study showed that the level of empowerment of Rindu Hati villagers in managing water resources was at the second level, even though the mastery and access to various systems and resources needed had not been obtained by all communities, only a portion of the community had such control and access. Rindu Hati villagers are more focused in their daily activities, namely as farmers to fulfill their basic needs or living needs, do not yet have full awareness and actively participate in protecting the environment and controlling various programs and policies of government institutions.

Keywords: *Community Empowerment, Water Resources, Watershed, Rindu Hati*

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan tingkat keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air di DAS Air Bengkulu bagian hulu (Sub DAS Rindu Hati), dan manfaat penelitian adalah : 1) Bagi Masyarakat, Dapat digunakan sebagai dasar atau acuan untuk meningkatkan keberdayaan dan keterlibatan aktif dalam seluruh program pemberdayaan pemerintah ataupun memiliki kesadaran penuh untuk menjaga dan mengendalikan lingkungan agar tetap lestari; 2) Bagi Pemerintah, Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dan 3) Bagi peneliti, Sebagai salah satu sumbangan pengetahuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan aparat desa Rindu Hati. Analisis data dilakukan dengan teknik snowball. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat desa Rindu Hati dalam pengelolaan sumberdaya air berada pada tingkat kedua, walaupun penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan belum seluruh masyarakat memperolehnya, hanya sebagian masyarakat yang memiliki penguasaan dan akses tersebut. Masyarakat desa Rindu Hati lebih fokus dalam kegiatannya sehari-hari yaitu sebagai petani untuk memnuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan hidupnya, belum memiliki kesadaran penuh dan berpartisipasi secara aktif untuk menjaga lingkungan dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi pemerintahan.

Kata Kunci : Keberdayaan Masyarakat, Sumberdaya Air, DAS, Rindu Hati

A. Pendahuluan

DAS Air Bengkulu merupakan DAS regional dan bentang alam yang memiliki peran penting bagi masyarakat di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah. DAS Air Bengkulu terbagi dalam 3 Sub-DAS (BPDAS Ketahun, 2006), yaitu: 1) Sub-DAS Rindu Hati mencakup area seluas 19.207 ha; 2) Sub-DAS Susup mencakup area seluas 9.890 ha; dan 3) Sub-DAS Bengkulu Hilir mencakup area seluas 22.402 hektar. Enam anak sungai yang mengalir ke Sungai Air Bengkulu adalah : 1) Sungai Susup; 2) Sungai Rindu Hati; 3) Sungai Kemumu; 4) Sungai Pasemah; 5) Sungai Sialang; dan 6) Sungai Muara Kurung. Sungai Susup adalah bagian dari Sub-DAS Susup. Sungai Rindu Hati dan Kemumu membentuk Sub-DAS Rindu Hati. Sungai Pasemah, Sialang, dan Muara Kurung membentuk Sub-DAS Bengkulu Hilir.

Kerusakan DAS Air Bengkulu dewasa ini, dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik kepentingan dan kurang keterpaduan antar sektor, antar wilayah hulu-tengah-hilir, terutama pada era otonomi daerah. Persoalan yang terjadi adalah maraknya penambangan batubara dan perkebunan karet di hulu DAS Air Bengkulu. Luas DAS Air Bengkulu sekitar 51.950 hektar. DAS ini terdiri dari Sub-DAS Susup seluas 10.040 hektar dengan panjang sungai utama 15,76 kilometer, Sub-DAS Rindu Hati seluas 19.357 hektar dengan panjang sungai utama 19,4 kilometer, dan sub-DAS Bengkulu Hilir seluas 22.552 hektar dengan panjang sungai utamanya 24,5 kilometer khususnya sub DAS Rindu Hati yang tidak memperhatikan keberlangsungan ekosistem. Buruknya kualitas air Bengkulu menjadi perhatian Yayasan Ulayat Bengkulu (YUB) dan juga akademisi FKIP UNHAZ setelah survey lokasi yang berbarengan dengan kegiatan kuliah kerja lapangan (KKL) , mengingat fungsi sungai sebagai penyedia air minum PDAM Kota Bengkulu.

Program yang melibatkan masyarakat ataupun forum masyarakat DAS sudah dilaksanakan, akan tetapi kondisi DAS Air Bengkulu tetap tidak memperhatikan keberlangsungan ekosistem. Pemerintah kurang perhatian dan sungguh-sungguh

untuk mengikutsertakan masyarakat pengguna air dalam pengelolaan air, hanya melaksanakan program kerja secara teknis. Sampai saat ini tetap terjadi degradasi air di sungai Rindu Hati. Padahal, DAS Air Bengkulu berfungsi sebagai penyedia air minum PDAM Kota Bengkulu. Semua program pemberdayaan masyarakat, baik yang diprakarsai pemerintah pusat ataupun bermitra dengan pemerintah daerah menerapkan proses pemberdayaan. Namun hingga sekarang masih jarang dilaporkan data tingkat keberdayaan masyarakat setelah program-program tersebut dilaksanakan.

B. Tinjauan Pustaka Keberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik.

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi kognitif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, afektif, dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan

terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal (Ambar Teguh, 2004: 80-81).

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (survive) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan (Wrihatnolo, 2007: 75). Adapun tingkatan keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti yang dikutip dalam bukunya Hurairah (Hurairah, 2008: 90) adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar
- b. Tingkat keberdayaan kedua adalah, penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan
- c. Tingkat keberdayaan ketiga adalah, dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan
- d. Tingkat keberdayaan keempat adalah, kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas
- e. Tingkat keberdayaan kelima adalah, kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Pengelolaan Sumberdaya Air

Sumberdaya air adalah bagian dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang antara lain terdiri dari sub sistem sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya sosekbud, dan sumberdaya air itu sendiri. Pengelolaan sumberdaya air tidak terlepas dari pengelolaan DAS, dengan demikian strategi pengelolaan DAS yang baik akan menghasilkan sumberdaya air yang baik pula (Yuwono et al., 2011).

Proteksi DAS mengacu kepada komoditas jasa lingkungan yang terdiri dari seperangkat pemanfaatan lahan yang menjaga kesatuan dari DAS untuk menghasilkan air yang secara kualitas relatif bebas dari bahan pencemar, berbagai jasa lingkungan DAS biasanya berasosiasi dengan keterkaitan daerah hulu dan hilir yang memberikan implikasi bahwa penyedia jasa tidak dapat menjadi pemanfaat jasa dan dengan demikian mekanisme pembayaran jasa lingkungan terjadi antara komunitas hulu dan penerima manfaat di hilir (Danida, 2011). Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sedangkan Pengelolaan sumber daya air 8 adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pengaruh hutan pada tata air (hasil air) akan nyata bila kondisi hutan mengalami perubahan secara nyata. Adanya penanaman maupun penebangan yang luas, menimbulkan perubahan dalam tata air (hasil air) secara nyata. Perubahan hutan (penebangan atau penanaman) yang sempit (tidak luas) pengaruhnya terhadap hidrologi (tata air) tidak nyata atau tidak terdeteksi (Pudjiharta, 2008).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan

segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Dalam mempelajari ekosistem DAS, dapat diklasifikasikan menjadi daerah hulu, tengah dan hilir. DAS bagian hulu dicirikan sebagai daerah konservasi, DAS bagian hilir merupakan daerah pemanfaatan. DAS bagian hulu mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air, karena itu setiap terjadinya kegiatan di daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen serta material terlarut dalam sistem aliran airnya. Dengan perkataan lain ekosistem DAS, bagian hulu mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan DAS. Perlindungan ini antara lain dari segi fungsi tata air, dan oleh karenanya pengelolaan DAS hulu seringkali menjadi fokus perhatian mengingat dalam suatu DAS, bagian hulu dan hilir mempunyai keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi.

Dalam rangka memberikan gambaran keterkaitan secara menyeluruh dalam pengelolaan DAS, terlebih dahulu diperlukan batasan-batasan mengenai DAS berdasarkan fungsi, yaitu pertama DAS bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. Kedua DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Ketiga DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan

pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.

Keberadaan sektor kehutanan di daerah hulu yang terkelola dengan baik dan terjaga keberlanjutannya dengan didukung oleh prasarana dan sarana di bagian tengah akan dapat mempengaruhi fungsi dan manfaat DAS tersebut di bagian hilir, baik untuk pertanian, kehutanan maupun untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya rentang panjang DAS yang begitu luas, baik secara administrasi maupun tata ruang, dalam pengelolaan DAS diperlukan adanya koordinasi berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah secara baik.

C. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di desa Rindu Hati yang berada di Sub DAS Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki permukaan tanah landai (0-8%) seluas 8,9%, berbukit (8-15%) sebesar 6,6%, berbukit kelerengan (dengan kemiringan 15-25% sebesar 6,0%), lereng (25-40%) sebesar 3,2% hingga berbukit curam (>40%) seluas 0,2%. Kecamatan Taba Penanjung dilintasi sungai Rindu Hati sepanjang 19 Km yang terletak di kawasan DAS Air Bengkulu sub DAS Rindu Hati dengan luas 19.357,69 Hektar.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif guna mengetahui keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air di desa Rindu Hati. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang dipilih dengan teknik purposive. Penentuan informan didasarkan pengetahuan, pengalaman, dan jabatannya berkaitan dengan pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal dan aparat desa Rindu Hati

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengelolaan DAS adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik antar sumberdaya alam terutama vegetasi, tanah dan air dengan sumberdaya manusia di sekitar aliran sungai dan segala aktivitasnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan jasa lingkungan bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem DAS (Departemen Kehutanan, 2008).

Mengingat hulu DAS memiliki peran vital bagi masyarakat, maka diperlukan pengelolaan yang tepat dan melibatkan semua pihak yang terkait. Keterlibatan secara aktif para pihak (stakeholders) akan membangun rasa memiliki, memanfaatkan secara arif, dan memelihara sumberdaya secara bersama-sama. Dalam pengelolaan DAS, sumberdaya manusia (human capital) dalam hal ini masyarakat merupakan komponen yang memiliki andil dalam upaya pengelolaan sumberdaya air di DAS. Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang otoritas kebijakan dan fasilitator. Akan tetapi, di desa Rindu Hati masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya air di DAS, hanya bertindak sebagai pengamat dan pelaksana program (pekerja). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan YS (55 tahun), yang mengemukakan bahwa: “Masyarakat kurang dilibatkan dalam pelaksanaan program pengelolaan sumberdaya air. Jika program sudah mulai berjalan, barulah sebagian masyarakat dilibatkan sebagai pelaksana/pekerja program yang sudah ditetapkan penyelenggara dan aparat desa”.

Peran serta masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama akan mempercepat keberhasilan pengelolaan sumberdaya air di wilayah sub DAS Rindu Hati secara berkelanjutan. Peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan sumberdaya air di hulu DAS (sub DAS Rindu Hati) dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Partisipasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan upaya pengelolaan hulu DAS (sub DAS Rindu Hati) dan konservasinya baik dengan cara menyumbangkan pikiran (ide), materi (dana), dan tenaga. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat sebagian besar hanya menyumbangkan tenaga. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Md (46 tahun) yang mengemukakan bahwa :

“waktu ada program yang berjalan, masyarakat lah yang mengerjakan, kalau untuk prosesnya hanya aparat desa yang melakukan koordinasi baik pikiran (ide) dan materi (dana). Seperti contohnya

pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang berbatasan langsung dengan sungai”.



Gambar 3. Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga (Program Pembangunan Desa)

Beberapa upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah dengan membangun dialog dan kesepakatan dengan instansi pemerintah dalam pengelolaan DAS, untuk mendukung upaya ini diperlukan keterkaitan sektor-sektor dinas, petani, LSM, Forum DAS dan masyarakat, sedangkan output/keluaran yang diharapkan adalah masyarakat dengan kesadarannya sendiri ikut aktif menjaga kelestarian DAS. Pada kenyataannya, dapat diketahui bahwa yang terlibat dalam dialog forum DAS dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terkait belum melibatkan seluruh masyarakat desa Rindu Hati. Seperti halnya keberadaan bus sekolah yang merupakan CSR dari salah satu perusahaan tambang batubara yang lokasinya berbatasan langsung dengan Desa Rindu Hati. Masyarakat tidak mengetahui tujuan dan asal muasal dari adanya fasilitas tersebut, dikarenakan masih dipungut bayaran jika anak-anak sekolah menggunakan bus.



Gambar 4. CSR PT Bara Mega Quantum

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang program desa seutuhnya dan kolaborasi aparat desa dengan pihak-pihak terkait. Masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya hanya menjalankan rutinitas sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama kebutuhan hidupnya terpenuhi, maka mereka tidak terlalu peduli dengan program-program desa.

Berbagai program yang telah dilakukan memunculkan asumsi bahwa masyarakat luas di desa Rindu Hati paham arti penting DAS baik untuk fungsi ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Akan tetapi, hal itu belum terealisasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan MT (40 tahun) yang mengemukakan bahwa :

”program penyuluhan ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan DAS yang dilakukan di desa Rindu Hati belum ada yang rutin, masih kadang-kadang saja jika ada proyek yang akan dilaksanakan. Masyarakat memanfaatkan sungai untuk keperluan pertanian dan MCK, belum ada pengelolaan yang lebih baik sehingga sungai menjadi tercemar sampah, limbah, dan airnya kecil saat kemarau. Untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat menggunakan air PDAM “.



Gambar 5. Kondisi Sumberdaya Air

Upaya lainnya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat adalah menyelenggarakan penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam DAS. Untuk kelancaran program ini dilakuka koordinasi berbagai sektor yaitu Kementerian Kehutanandan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Dinas-dinas propinsi dan Kabupaten/Kota, LSM dan forum DAS. Output atau keluaran yang diharapkan dan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian DAS, namun yang dapat dibangun adalah masyarakat luas paham arti pentingnya DAS baik untuk fungsi ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.

Pengelolaan DAS melibatkan banyak pihak mulai unsur pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Ada indikasi bahwa kesadaran dan kemampuan para pihak dalam melestarikan ekosistem DAS masih rendah, misalnya masih banyak lahan yang seharusnya berupa kawasan lindung atau resapan air masih digunakan untuk fungsi budidaya yang diolah secara intensif atau dibangun untuk pemukiman baik secara legal maupun illegal, sehingga meningkatkan resiko erosi, longsor dan banjir. Dalam aliran sungai sendiri sering dijumpai sampah dan limbah dari berbagai sumber yang menyebabkan pendangkalan, penyumbatan, dan pencemaran air sungai

sehingga kualitas air dan palung sungai menjadi rusak yang pada akhirnya merugikan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Daerah hulu merupakan daerah yang berada dekat dengan aliran sungai yang merupakan tempat tertinggi dalam suatu DAS, dan DAS memiliki aspek sosial yang kompleks. Sebagian penduduk yang memiliki tanah di DAS atau yang bergantung pada sumber DAS tidak tinggal di dalam DAS tersebut. Dengan kata lain ada petani yang tinggal di luar DAS, yang merupakan pemilik lahan pertanian yang terletak dalam suatu DAS atau penduduk yang memanfaatkan sumber daya alam ini. Ada petani yang tidak memiliki lahan garapan, dan ada petani yang memiliki lahan di beberapa DAS. Aspek sosial ini sangat berperan dalam pembentukan sebuah lembaga yang mengelola program DAS. Oleh karena itu, kompleksitas ini sangat penting untuk dipahami agar program pengelolaan sumberdaya air dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa Rindu Hati (Md, 45 tahun), diketahui bahwa : “Partisipasi masyarakat masih sedikit dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan sumberdaya air”. Hal ini mungkin terjadi karena tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat desa Rindu Hati tergolong rendah, sebagian besar tamatan SD”.

Penduduk yang tinggal dalam DAS dan menggunakan sumberdaya alam tersebut merupakan bagian penting dari program pengelolaan DAS. Program ini harus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen penduduk akan perlunya perlindungan sumberdaya alam agar saling menguntungkan. Disamping itu, pengembangan keahlian, kearifan dan rasa percaya diri penduduk dalam mengelola dan meningkatkan sumberdaya alam sangat dibutuhkan. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam tanah, air dan vegetasi serta sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut. DAS memikul beban amat berat sehubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan

sumberdaya alamnya yang intensif sehingga terdapat indikasi belakangan ini bahwa kondisi DAS semakin menurun dengan indikasi meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi dan sedimentasi, banjir, dan kekeringan. Di sisi lain, tuntutan terhadap kemampuannya dalam menunjang sistem kehidupan, baik masyarakat di bagian hulu maupun hilir demikian besarnya.

Sebagai suatu kesatuan tata air, DAS dipengaruhi kondisi bagian hulu khususnya kondisi biofisik daerah tangkapan dan daerah resapan air yang di banyak tempat rawan terhadap ancaman gangguan manusia. Hal ini mencerminkan bahwa kelestarian DAS ditentukan oleh pola perilaku, keadaan sosial-ekonomi dan tingkat pengelolaan yang sangat erat kaitannya dengan pengaturan kelembagaan (institutional arrangement). Tidak optimalnya kondisi DAS antara lain disebabkan adanya ketidakterpaduan antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS tersebut. Dengan kata lain, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan tujuan yang kadangkala bertolak belakang. Ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang belum berdaya dalam mengelola sumberdaya air dengan baik yang sangat bermanfaat untuk kegiatan pertanian yang dilakukan dan untuk kegunaan lainnya.

Sumberdaya sosial masyarakat merupakan sejumlah potensi yang tersimpan dalam masyarakat dan bila didayagunakan secara baik akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan (Kartasasminta, 1997). Jika tingkat keberdayaan masyarakat sudah tinggi, maka program pengelolaan sumberdaya air di DAS Bengkulu (sub DAS Rindu Hati) dapat berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan permasalahan, seperti tercemar limbah, erosi, longsor, banjir, dan kekeringan.

Pengelolaan DAS terpadu dilakukan secara menyeluruh mulai keterpaduan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan, rencana kegiatan, implementasi program yang telah direncanakan serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara terpadu. Pengelolaan DAS terpadu selain mempertimbangkan faktor biofisik dari hulu sampai hilir juga perlu mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi, kelembagaan, dan

hukum. Menurut Fahmudin dan Widiyanto, (2004), permasalahan pokok yang mungkin dijumpai di dalam DAS adalah erosi dan degradasi lahan, kekeringan dan banjir, penurunan kualitas air sungai, dan pendangkalan sungai, danau atau waduk. Pemilihan teknologi untuk pengelolaan DAS tergantung pada sifat DAS yang mencakup tanah, iklim, sungai, bukit dan masyarakat yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu tidak ada resep umum yang bisa diberikan dalam memecahkan permasalahan DAS.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu program pengelolaan DAS dikarenakan anggota masyarakatlah yang mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingannya atau kebutuhan mereka seperti: (1) Mereka memahami sesungguhnya tentang keadaan lingkungan sosial ekonomi masyarakatnya, (2) Mereka mampu menganalisis sebab akibat dari berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat, (3) Mereka mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi masyarakat, (4) Mereka mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA, SDM, dana, dan teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi dan produktifitas dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan masyarakat, (4) anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berlandaskan pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar (Adisasmita, 2006: 36-37). Hal serupa juga dikemukakan Cole dalam Boley (2014: 631) mengemukakan bahwa “community participation is not the final goal and sustainable tourism ultimately fails if residents are not empowered. She indicates that resident empowerment represents the top end of the participation ladder where members of a community are active 10 agents of change and they have the ability to find solutions to their problems, make decisions, implement actions and evaluate their solutions”.

Pentingnya partisipasi juga dikemukakan oleh Septyasa (2013:60-63), yaitu masyarakat yang berpartisipasi memiliki karakteristik: (1) masyarakat yang kritis yang berarti masyarakat yang

mengetahui masalah yang dihadapinya dan berusaha memecahkan masalah tersebut untuk meningkatkan mutu kehidupannya, (2) Masyarakat berdiri sendiri yang berarti masyarakat yang mengetahui potensi dan kemampuannya termasuk hambatan karena keterbatasan, (3) Masyarakat yang mau berkarya. Partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam suatu program dan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan semakin memiliki ketahanan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan maupun pemberdayaan sangat memiliki peranan penting.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa “Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan kswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik”. Sedangkan menurut Suharto (2010: 60) mengatakan bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat yang lemah atau tidak memiliki ketidakberdaya baik karena masalah internal (persepsi sendiri) maupun masalah eksternal (misalnya ditindas karena struktur sosial yang kurang adil). Menurut Wijaya (2002: 77) mengatakan tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangkitkan segala kemampuan yang ada pada masyarakat untuk mencapai tujuan pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. Menurut Suryana (2010:19) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat mejadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik,

afektif dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya dan masyarakat yang mandiri. Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang lemah berbagai bidang baik bidang ekonomi, sosial maupun bidang lainnya. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan sehingga tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan masyarakat agar menjadi masyarakat yang berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Menurut Widjajanti (2011:18) Keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri. Keberdayaan masyarakat diukur melalui tiga aspek (a) kemampuan dalam pengambilan keputusan, (b) kemandirian dan (c) kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan. Menurut Person et.al (1994: 106) yang di kutip oleh Suharto (2010: 60) mengajukan tiga dimensi indikaor keberdayaan yang merujuk pada : a) sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan yang lebih besar, b) sebuah kondisi psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain, c) pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisi orang-orang lemah dan melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang – orang lemah tersebut memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang menekan.

Terdapat beberapa indikator masyarakat yang berdaya, antara lain: (1) Mempunyai kemampuan menyiapkan dan

menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat, (2) Dapat berjalan “bottom up planning”, (3) Kemampuan dan aktivitas ekonomi, (4) Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga, (5) Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan (Suhendra, 2006: 86). Oleh karena itu, masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Masyarakat yang berdaya menurut Tilaar (1999: 231) ialah masyarakat yang hidup di dalam suatu masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang percaya atas kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupannya yang lebih baik dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat desa Rindu Hati dalam pengelolaan sumberdaya air berada pada tingkat kedua, walaupun penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan belum seluruh masyarakat memperolehnya, hanya sebagian masyarakat yang memiliki penguasaan dan akses tersebut. Masyarakat desa Rindu Hati lebih fokus dalam kegiatan nya sehari-hari yaitu sebagai petani untuk memnuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan hidupnya, belum memiliki kesadaran penuh dan berpartisipasi secara aktif untuk menjaga lingkungan dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi pemerintahan. Rendahnya kesadaran, kemampuan dan partisipasi para pihak dalam pengelolaan DAS menjadi tantangan bagi para pengelola DAS dan unsur lain yang terkait dengan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat secara luas.

E. Kesimpulan Dan Saran

1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat desa Rindu Hati dalam pengelolaan sumberdaya air berada pada tingkat kedua, walaupun penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan belum seluruh masyarakat memperolehnya, hanya sebagian masyarakat yang memiliki penguasaan dan akses

tersebut. Masyarakat desa Rindu Hati lebih fokus dalam kegiatannya sehari-hari yaitu sebagai petani untuk memnuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan hidupnya, belum memiliki kesadaran penuh dan berpartisipasi secara aktif untuk menjaga lingkungan dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi pemerintahan.

2.Saran

Bagi Pemerintah : Program pemberdayaan masyarakat mengenai pengelolaan sumberdaya air ataupun pengelolaan DAS diharapkan dapat melibatkan seluruh masyarakat sehingga dapat berpartisipasi aktif dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam seluruh program dan kebijakan institusi (forum DAS, dan sebagainya) dan pemerintahan khususnya pengelolaan sumberdaya air di sub DAS Rindu Hati.

Bagi Peneliti selanjutnya : dapat digunakan sebagai penelitian dasar tentang pengelolaan DAS Terpadu di Sub DAS Rindu Hati maupun DAS Bengkulu

- Septyasa, 2003. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang Pertanian. Jakarta : Elex komputindo
- Suhendra, 2006. Kolaborasi Program Pemberdayaan Masyarakat. Jogjakarta: Andi Offset
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta : Gava Media
- Tilaar, H.A.R. 1999. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, Tera Indonesia, Jakarta.
- Widjajanti, 2011. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Gava Media
- Wrihatnolo, Randy R. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Elex Komputindo

Daftar Pustaka

- BPDAS Ketahun. 2016. Profil Kondisi DAS Bengkulu. Ketahun: BPDAS.
- Casali, J. R. Gimenez, J. Diez, J. Alvarez-Mozos, J. D.V. de Lersundi, M. Goni, M. A. Campo, Y. Chahor, R. Gastesi, J.Lopez. 2010. ‘Sediment Production and Water Quality of watersheds with Contrasting Landuse in Navarre (Spain)’. Jurnal Agricultural Water Management 97 PP. 1683-1694.
- Hurairah, Abu. 2008. Pengorganisasian & Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora
- Kementerian Kehutanan, 2012. Permenhut No. P.32/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2009 tentang tata cara penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai (RTk RHL-DAS). Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup, 2003. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.